

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perusahaan jasa dibidang akuntansi saat ini semakin berkembang, salah satunya adalah yaitu Kantor Akuntan Publik(KAP), Kantor Konsultan Pajak (KPP) , dan Kantor Konsultan semacamnya yang lain. Kantor pelayanan jasa tersebut selalu memberikan layanan kepada para klien untuk membantu dari mulai menyusun laporan keuangan, melaporkan perpajakannya, dan juga bahkan melakukan prosedur audit agar mendapatkan laporan audit independen yang dipergunakan untuk pasar saham. Tidak hanya itu, Kantor Konsultan selalu memberikan edukasi mengenai perkembangan ekonomi atau prosedur yang berlaku di Indonesia seiring berjalannya waktu.

Kantor Akuntan Publik juga tidak hanya melakukan satu pekerjaan semata, selain melakukan audit kepada klien terkadang Kantor Akuntan Publik juga memberikan pelayanan seperti membantu klien untuk melaporkan pajak masa tahunannya juga. Karena setiap klien terkadang memiliki permasalahan tersendiri ketika hendak melaporkan perpajakannya, seperti harus melakukan rekonsiliasi *fiscal* terlebih dahulu, dan prosedur-prosedur lainnya.

Seperti pada realisasi nya, penulis mengutip dari website resmi Kemenkeu Indonesia yang menyatakan bahwa sampai dengan bulan Januari tahun 2019, realisasi atas pendapatan dan hibah yang dimiliki negara mencapai Rp108,08 Triliun atau sebesar 4,99% daripada target APBN untuk tahun 2019, realisasi yang dilakukan itu didukung oleh realisasi penerimaan dari perpajakan senilai Rp89,7Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp18,32Triliun dan penerimaan hibah senilai Rp4,60Miliar. Disisi lain juga disebutkan bahwa Belanja Negara yang ter realisasi sampai dengan akhir Januari 2019 mencapai senilai Rp153,83 Triliun (yaitu kisaran 6,25% dari pagu APBN 2019), yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,35% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Negara tersebut diliputi atas Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp76,11 Triliun dan juga Transfer ke Daerah & Dana Desa senilai Rp77,72 Triliun dalam hal ini mendukung bahwa pemungutan pajak kepada masyarakat memang memiliki fungsi signifikan untuk diolah lagi dalam bentuk belanja negara yang secara tidak langsung juga masyarakat rasakan manfaatnya seperti pembangunan, fasilitas umum, dan sebagainya. Menurut data penerimaan PPh badan tahun 2017-2018 berdasarkan website Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan bahwa Realisasi atas penerimaan neto PPh Pasal 25/29 Badan terhadap tahun anggaran 2018 melonjak mencapai Rp245,05 Triliun atau bertumbuh sebesar 21,99% daripada realisasi atas anggaran tahun 2017. Pertumbuhan yang diakibatkan atas PPh Pasal 25/29 Badan ini lebih kecil daripada penambahan atas anggaran tahun 2017 yaitu sebesar 22,56%. Juga dijelaskan pada laman resmi tersebut, bahwa sektor dengan setoran atas PPh Pasal 25/29 yaitu berasal dari Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan kontribusi senilai 30,04% dan tingkat pertumbuhannya yaitu sekitar 17,21% tetapi kemudian terjadi penurunan pada triwulan ke-4, yakni Sektor Pertambangan dan Pengalihan, yang menjadi sektor paling dominan ketiga atas kontribusi senilai 18,30% yaitu sektor dengan pertumbuhan senilai, yaitu 20,53%” .

Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Jenis pajak yang merupakan undang undang pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 17, yaitu tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterapkan di Indonesia dengan menerapkan sistem tarif progresif. Yang artinya bahwa tarif pajak yang diterapkan akan semakin tinggi seiring atas jumlah penghasilan yang dijadikan dasar dari pengenaan pajaknya.

Tarif yang dikenakan pada PPh Pasal 17 untuk wajib pajak pribadi yaitu dari beberapa lapisan penghasilan dimulai dari 5% - 25% atas penghasilan dari beberapa lapisannya. Sementara untuk tarif yang diterapkan pada wajib pajak badan yang tertera dalam PPh Pasal 17 Ayat 1 (b), yakni sebesar 28%. Tetapi, pada Ayat 2(a) disebutkan mulai tahun pajak 2010 tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dikenakan sebesar 25%.

PT XYZ merupakan perusahaan pengolahan ikan segar tuna dan eksportir ikan nasional yang berlokasi di Indonesia. Kegiatan dari usaha PT XYZ ini merupakan kegiatan dari mulai pengolahan hingga tuna tersebut nanti nya di eksport, maka PT XYZ melakukan kegiatan operasional tersebut dalam usahanya. Dalam masa pajak tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajaknya maka PT XYZ memilih KAP TGS AU Partners untuk membantu dalam hal pelaporan pajaknya. Transaksi nya dimulai dari meminta data dokumen PT XYZ lalu membuat *working paper* khusus untuk SPT 1771 Badan yang berisikan koreksi *fiscal* seperti penyusutan asset tetap. Proses menyusun SPT 1771 dilakukan dengan memulai membuat SPT nya di *e-SPT* lalu mengisi lampiran lampiran yang dibutuhkan dimulai dari lampiran I, II, dan setelahnya bebas dan untuk induk diisi terakhir lalu setelah jadi dibuat file *csv* nya untuk di *upload* I website Direktorat Jenderal Pajak untuk dilaporkan.

Sesuai uraian di atas, penulis mengakui dan menyadari bahwa sangat pentingnya pelaporan pajak bagi badan usaha tetap untuk tetap dapat melakukan kegiatan usaha nya sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meninjau dan mengetahui lebih lanjut terkait dengan proses pelaporan PPh Badan tersebut sehingga dapat menghasilkan *E-SPT*. Dengan latar belakang seperti yang dijelaskan, Penulis memutuskan untuk membuat dan menyusun laporan atas kegiatan yaitu Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan atas Pelaporan PPh Badan PT XYZ yang dilakukan oleh KAP TGS AU Partners”**.

I.2 Tujuan

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari tugas akhir ini adalah:

- 1) Mengetahui bagaimana proses pelaporan PPh Badan Tahun 2019 untuk kegiatan badan usaha pengolahan ikan yang dilakukan oleh KAP TGS AU Partners.
- 2) Mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh KAP TGS AU Partners dalam memberikan jasa di bidang pajak.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini dibuat adalah untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Program Akuntansi Program Diploma, di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pengambilan data laporan tugas akhir ini dilakukan oleh penulis di KAP TGS AU Partners.

I.3 Manfaat

Manfaat penyusunan tugas akhir ini antara lain:

a. Manfaat teoritis

Tugas akhir secara teoritis ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan serta wawasan ke pembaca atas bidang ilmu yang terkait Pelaporan PPh Badan atas badan usaha tetap tepatnya dalam bidang usaha pengolahan ikan.

b. Manfaat praktis

Sebagai pengambil keputusan untuk melaporkan pajak terhutang PPh badan atas tahun pajak 2019. Sesuai dengan penghasilan yang sudah dihitung dari perhitungan pajaknya, sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan terkait kegiatan operasionalnya.